

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Oktaviani (2019) Masjid merupakan lembaga keagamaan Islam yang menjadi bagian dari organisasi publik nirlaba, yang biasa disebut dengan organisasi nirlaba. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi masjid sendiri juga mendukung banyak kegiatan sosial dan pendidikan lainnya. Menurut Ula et al (2021). Masalah muncul karena masjid biasanya menyampaikan laporan keuangan yang hanya mencantumkan penerimaan dan pengeluaran kas dari jamaah. Tidak jelas dari mana dana yang diterima masjid berasal atau untuk apa dana tersebut digunakan. Namun, banyak masjid yang tidak mampu mengelola dana yang diterimanya dari masyarakat dengan baik dan berkualitas. Menurut Oktaviani (2019) Kenyataannya, kesadaran dan kapasitas pengurus masjid masih relatif rendah. Kendala yang dihadapi masih banyak, terutama minimnya pengurus masjid yang memiliki latar belakang keuangan, belum lagi kesadaran penerapan akuntansi pada organisasi masjid.

Pelaporan penggunaan dana oleh organisasi nirlaba, seperti masjid, penting karena merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi yang membuat organisasi bertanggung jawab kepada publik. Dalam hal ini, beberapa masjid di wilayah Sidoarjo umumnya menggunakan dana tersebut untuk biaya operasional dan kegiatan sosial.

Masjid merupakan organisasi nirlaba dan diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan atas dana yang diterima dan digunakan, yang wajib dilaporkan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan masjid. (Fauzi & Setyaningsih, 2020) (Kusumadyahdewi, 2018). Penerbitan laporan keuangan dapat membantu mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pengembalian positif atas dana yang dipercayakan kepada mereka (Oktavia Widhawati et al., 2021). Konsep akuntansi Syariah mencerminkan ajaran Islam dari berbagai aspek kehidupan, bisnis, dan akuntansi (Batubara, 2019).

Pada umumnya organisasi keagamaan salah satunya Masjid Besar Miftahul Abidin sudah melaksanakan pencatatan dengan baik atas penerimaan dan pengeluaran kas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para donator dan secara periodik melaporkannya kepada Masyarakat salah satunya melalui pengumuman pada saat ibadah solat Jumat. Namun banyak pengurus Masjid menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku seperti tidak dilakukannya pengelompokan akun, penggunaan nama akun yang tidak umum, penggunaan nama akun yang tidak konsisten untuk transaksi yang sejenis, tidak adanya pemisahan dana yang sifatnya dibatasi maupun tidak. Sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada sulitnya donatur atau pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan dari pengurus Masjid masih awam dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan yang seharusnya digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pengetahuan, dan juga kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan Masjid. Tentunya hal

ini perlu disikapi dengan bijak melalui sosialisasi kepada pengurus mesjid dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sebaiknya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan melainkan untuk mencapai tujuan khusus terkait dengan kepentingan umum Halim (2011). Dalam perkembangannya beberapa organisasi sektor publik sudah masuk pada aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi dan keagamaan Bastian (2007). Berdasarkan definisi dari organisasi sektor publik yaitu organisasi yang dibiaya oleh publik dan menjalankan kegiatan untuk pelayanan publik pula. Oleh karena pengertian sektor publik sangat luas, maka organisasi sektor publik telah berkembang cukup luas. Salah satu organisasi sektor publik di bidang keagamaan adalah Masjid. Sebagai organisasi sektor publik, masjid memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal atau yang bersumber dari publik pula. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional masjid seperti gaji pengurus masjid, pembelian ATK dan lainlain. Untuk itulah masjid harus mempertanggungjawabkan segala penggunaan dana masjid kepada masyarakat setempat. Bentuk pertanggungjawaban masjid-masjid yang ada di Krian kepada masyarakat biasanya dilaporkan setiap seminggu sekali pada saat ibadah sholat jum'at. Laporan yang diberikan dalam bentuk informasi saldo kas minggu sebelumnya, jumlah penerimaan jum'at sebelumnya dan penggunaan kas pada jum'at sebelumnya. Berdasarkan pengamatan kami pengelola masjid tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban secara rinci seperti Neraca atau laporan realisasi anggaran.

Penting bagi masjid untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya untuk membangun kepercayaan publik. Jika laporan keuangan tidak transparan maka masyarakat akan menurunkan tingkat kedermawanan kepada Masjid tersebut dan beralih pada Masjid lain yang lebih dipercaya. Andikawati & Agus (2014) meneliti tentang Laporan Keuangan Lembaga Masjid di Lumajang menyatakan bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Kartika (2013) yang meneliti tentang bagaimanakah manajemen keuangan masjid di Kota Bogor dan bagaimanakah 3 potensi dana masjid tersebut. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Laporan keuangan masjid masih dibuat sangat sederhana. Sama seperti masjid-masjid lain yang ada di wilayah lainnya, masjid-masjid yang ada di Semarang juga merupakan salah satu organisasi sektor publik yang penerimaannya selain dari bantuan pemerintah namun juga dari sedekah setiap harinya serta zakat.

Mereka menyadari bahwa penting baginya untuk melaporkan kondisi riil masjid baik dana yang diperoleh dari sumber publik, dan dari pemerintah. Masjid ini juga menghadapi masalah yang sama yaitu belum mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparansi dan akuntabel. Mereka belum dapat membuat laporan keuangan secara baik dan benar. Selama ini mereka mempertanggungjawabkan dana bantuan dalam bentuk laporan penggunaan dana beserta buktinya. Laporan tersebut tidak menunjukkan kondisi riil dari masjid tersebut sehingga tidak menunjukkan kondisi masjid yang sebenarnya. Hal ini dimungkinkan menimbulkan terjadinya penyelewengan dana masjid tersebut, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada tamkir masjid.

Laporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan Mandasari (2015). Dengan kata lain, laporan keuangan atau bentuk laporan lainnya yang berhubungan dengan posisi keuangan perlu menjadi perhatian serius dan perlu dilaporkan ke publik agar tidak meresahkan dan menimbulkan kecurigaan antara pengurus dan jamaah. Dengan demikian, fungsi akuntansi menjadi sangat penting karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan masjid.

Keuangan mampu memudahkan serta membantu pihak masjid dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Tetapi, ditinjau dari aspek penyusun laporan keuangan dimana orangnya harus profesional dan memiliki background akuntansi sehingga mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan ETAP maka akan memunculkan persoalan. Perlu diingat, bahwa salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan, sehingga dalam pelaporan keuangannya tidak hanya pada formatnya saja yang harus disusun, tetapi lebih pada substansi pertanggungjawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu laporan keuangan sudah cukup memadai jika data keuangan yang ada di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai informasi bagi para penggunanya meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan standar tertentu seperti SAK ETAP. Namun, untuk membantu masyarakat lebih memahami informasi

laporan keuangan, masjid juga harus meningkatkan literasi ekonomi mereka sehingga akan semakin banyak orang yang menyadari betapa pentingnya mengelola entitas masjid dengan baik dan efektif. Maka dari uraian di atas tersebut peneliti ingin menganalisis bagaimana bentuk laporan (keuangan) yang dijadikan media pertanggungjawaban transparansi keuangan di masjid “Besar Miftahul Abidin Kemangsren ” Krian Kabupaten Sidoarjo.

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah adanya perbedaan lokasi penelitian, adanya perbedaan metode penelitian, dan fokus penelitian yang saat ini lebih ke peran laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan pada keuangan entitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan dijelaskan diatas mengenai transparansi keuangan entitas dalam laporan keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana bentuk Pengelolaan (Keuangan) dijadikan sebagai media pertanggungjawaban di Lingkungan Masjid Besar Miftahul Abidin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Besar Miftahul Abidin kec Krian. Peneliti ini juga bertujuan menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan masjid Besar Miftahul Abidin Kec Krian.

1.4 Manfaat Penelitian

14.1 Manfaat Teoritis

1. Harapan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dari hasil pertanggungjawaban laporan keuangan oleh pengurus Masjid Besar Miftahul Abidin ?
2. Tambahan rujukan penelitian selanjutnya yang meneliti topik terkait, yang mempresentasikan bentuk pemikiran penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Masjid
 - a. Sebagai bahan informasi dan perbaikan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan serta dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan.
 - b. Sebagai gambaran terutama bagian akuntansi untuk penerapan laporan keuangan yang dijadikan bahan pertanggungjawaban keuangan.
2. Bagi Jurusan Akuntansi
 - a. Sebagai bahan masukan bagi jurusan akuntansi Universitas Trunojoyo Madura untuk mengevaluasi dan informasi tambahan untuk mengembangkan materi mata kuliah Akuntansi Keuangan.
 - b. Sebagai dasar penilaian kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu dan menerapkan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai media untuk mengukur potensi diri dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat mahasiswa pada dunia kerja.
- b. Memperluas wawasan mengenai pertanggungjawaban Laporan Keuangan dengan menganalisa secara langsung, sehingga nanti pada waktu bekerja dapat digunakan sebagai referensi dalam menjalankan pekerjaan.